

MEMBENDUNG (KONSPIRASI) PERAMPOK GLOBAL¹

Robi Nurhadi, M.Si.²

Pendahuluan

Untuk pertama kali, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional hadir pada perdebatan di Forum Sosial Dunia di Porto Alegre, Brasil, Sabtu (29/1/05). ... (ini adalah) pertemuan puncak anti globalisasi (ekonomi). dan diadakan untuk menandingi Forum Ekonomi Dunia yang bertemu di Davos, Swiss. ... pada pertemuan (tersebut) ... para delegasi ... menegaskan kembali rasa frustrasi mereka sehubungan dengan pengenalan persyaratan atas bantuan dana pembangunan.

Cuplikan paragraf di atas dapat kita baca pada Kompas edisi 31/1/05. Namun sesungguhnya, substansi fenomena persoalan di atas, bukanlah hal yang baru. Tapi sudah mendengung sejak angin globalisasi (ekonomi) didengungkan. Dan kemunculan civil society paruh akhir abad 19, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan (politik) global yang menentang globalisasi (ekonomi).

Kemunculan gerakan civil society (NGO's) plus people power yang mengglobal, akibat tekanan global di satu pihak dan kran demokratisasi yang mengglobal di pihak yang lain, bukanlah sesuatu yang tidak mengancam bagi negara-negara demokrasi yang berkomitmen mempertahankan agenda demokrasi. Melainkan, "sebuah gerakan" yang lambat-laun akan terus bermetamorfosis menjadi sebuah revolusi social (politik), seiring dengan terbatasnya energi kesabaran mayoritas warga dunia (negara-negara miskin dan berkembang) dan semakin mengguritanya kekuatan kapitalis global menghisap sumberdaya ekonomi dari warga dunia tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah Indonesia sebagai "pasien" dari agen utama kapitalis global.

Pokok Permasalahan

Sesungguhnya kehidupan 5,2 milyar manusia yang berserak di 182 negara ini, berada di bawah kontrol negara-negara maju yang tergabung dalam G7 (Amerika Serikat, Kanada, Itali, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis). Karena secara riil, keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup penduduk dunia tidak lagi ditentukan oleh warganegara (elit politik) yang berada di masing-masing negara, tetapi harus mengikuti keputusan yang digariskan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Bank Pembangunan Eropa (EBRD), Bank Pembangunan antar Amerika (IADB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Hampir seluruh negara di dunia telah menjadi anggota WTO. Demikian juga untuk Bank Dunia dan IMF. Sedangkan untuk AfDB, IDB, IADB maupun ADB, para anggotanya adalah negara-negara maju ditambah dengan negara-negara yang berlokasi di kontinen tersebut. Indonesia misalnya menjadi anggota WTO, Bank Dunia, IMF dan ADB. Tetapi tidak menjadi anggota AfDB maupun IADB.

Sistem pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada jumlah saham yang disetorkan anggota. Semakin besar saham diberikan, semakin besar suara (*vote*) negara yang bersangkutan. Pemegang saham terbesar umumnya dipegang oleh negara-negara maju. IMF misalnya, pemegang hak suara terbesar adalah Amerika Serikat (17,5%), Jepang (6,3%) dan Jerman

¹ Makalah yang disampaikan pada Kajian Strategis kerjasama UNAS dengan Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS) di Universitas Nasional pada tanggal 31 Januari 2005. Istilah "Perampok Global" dialamatkan pada sebuah rezim kapitalis dunia, yang pergerakannya secara substantif adalah merampok (menghisap) sumberdaya alam sekaligus mengkooptasi negara-negara miskin dan negara-negara berkembang yang menjadi "pasien"-nya, dengan berkedok sebagai sinterklas pembangunan global.

² Dosen FISIP Universitas Nasional, juga aktif di Pusat Studi Politik MADANI INSTITUTE yang menjadi mitra Koalisi Anti Globalisasi (Ekonomi) --KoAGe--. Sekretaris Pokja Kerjasama UNAS-WANTANAS.

(6,2%). Sedangkan untuk ADB, Amerika Serikat dan Jepang menguasai masing-masing 16,1% saham, dan Kanada (5,4%). Dari komposisi saham inilah dapat terdeteksi dengan jelas, bahwa kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga multilateral di atas menjadi sangat tergantung dengan kepentingan politik negara-negara maju.

Peluang membangun imperium politik yang tercipta dari kekuatan ekonomi yang terorganisir tersebut, semakin tercipta ketika mereka secara terorganisir pula membangun kekuatan ekonominya. Mereka menciptakan lembaga-lembaga keuangan untuk mendukung investasi mereka di negara-negara debitur. Lembaga ini umum disebut sebagai Lembaga Kredit Ekspor = ECA (*Export Credit Agencies*). ECA terbesar adalah JBIC untuk Jepang, Exim Bank untuk Amerika Serikat, EDC untuk Kanada, Hermes untuk Jerman. Kemudian mereka juga menciptakan lembaga-lembaga penjamin sendiri, yang tujuannya memberikan jaminan atas investasi asset-assetnya. Amerika Serikat misalnya, memiliki OPIC.

Pada saat yang sama negara-negara maju tersebut menciptakan pula perusahaan-perusahaan multinasional (MNC = Multinational corporation). Kekuatan ekonomi terbesar dunia didominasi oleh 57 Negara dan 43 MNC. Asset General Motor (AS) dan Exxon (AS) lebih besar ketimbang Yugoslavia, Swiss maupun Arab Saudi. British Petroleum (Inggris) menghasilkan lebih besar dibanding apa yang didapat Bulgaria, atau Finlandia. Penjualan General Motor dapat melebihi GNP (*Gros National Product*) negara-negara di dunia, begitu juga penghasilan ITT melebihi pendapatan negara Portugal.

Dari 50 MNC terkenal, 21 berbasis di Amerika Serikat yang menguasai 54% dari total penjualan dunia, disusul dengan Jerman 10 %, Inggris 9%, Jepang 7%, Perancis 6% dan Belanda 5%. Sepertiga dari perdagangan dunia didominasi oleh MNC, yang ternyata melakukan perdagangan di antara mereka sendiri. PBB memperkirakan 50% dari ekspor AS terjadi di antara MNC mereka sendiri, sementara Inggris mencapai 30%-nya. Ketika pelaku bisnis bertindak bersamaan sebagai pembeli dan penjual, maka mekanisme pasar tidak dapat diterapkan terhadap mereka. Karena si pengusaha dapat menentukan harga menurut selera mereka sendiri.

Bagaimana Mereka Bekerja ?

Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, maka para negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber-sumber (*resources*) di dunia. Lewat tangan WTO, mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia; lewat tangan lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara-negara dan siapa saja yang dapat menikmati kucuran uang lembaga keuangan itu. Lewat aturan IMF, mereka dapat menekan negara-negara untuk mengikuti 'resep' mereka: deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Kunci utamanya adalah liberalisasi atau pasar bebas, atau dalam bahasa awam bagaimana pasar di dunia terbuka seluas mungkin bagi produk-produk negara maju tersebut. Sehingga dengan sendirinya, ketika ada jaminan bahwa produk-produk mereka terjual di seluruh dunia, maka jaminan keuntungan kapital telah jelas di depan mata.

Tekanan deregulasi yang diusung setiap kali akan memberikan pinjaman, sesungguhnya lebih untuk memaksa negara-negara berkembang dalam menyesuaikan aturannya dengan 'kehendak' negara-negara maju. Lewat kebijakan WTO misalnya, pemerintah-pemerintah negara berkembang harus menyesuaikan aturan nasional mereka yang berkenaan dengan Hak Cipta. Salah satu kritik utama atas kebijakan hak cipta dalam WTO adalah tidak mengakuinya hak-hak cipta yang dilakukan oleh petani local ataupun masyarakat adat (*indigenous peoples*). sehingga tidak ada perlindungan ekonomi atas ciptaan mereka.

Sementara lewat desakan IMF –yang biasanya tertuang tertuang dalam LOI (Letter of Intent)—aturan-aturan perpajakan yang mendukung pasar bebas diterapkan, Demikian pula aturan-aturan yang dianggap menghambat kepemilikan global atas sumberdaya alam harus pula diubah. Indonesia telah cukup lama mengalami tekanan IMF, dengan dipaksa lahirnya UU Kehutanan dan UU Migas, dan UU

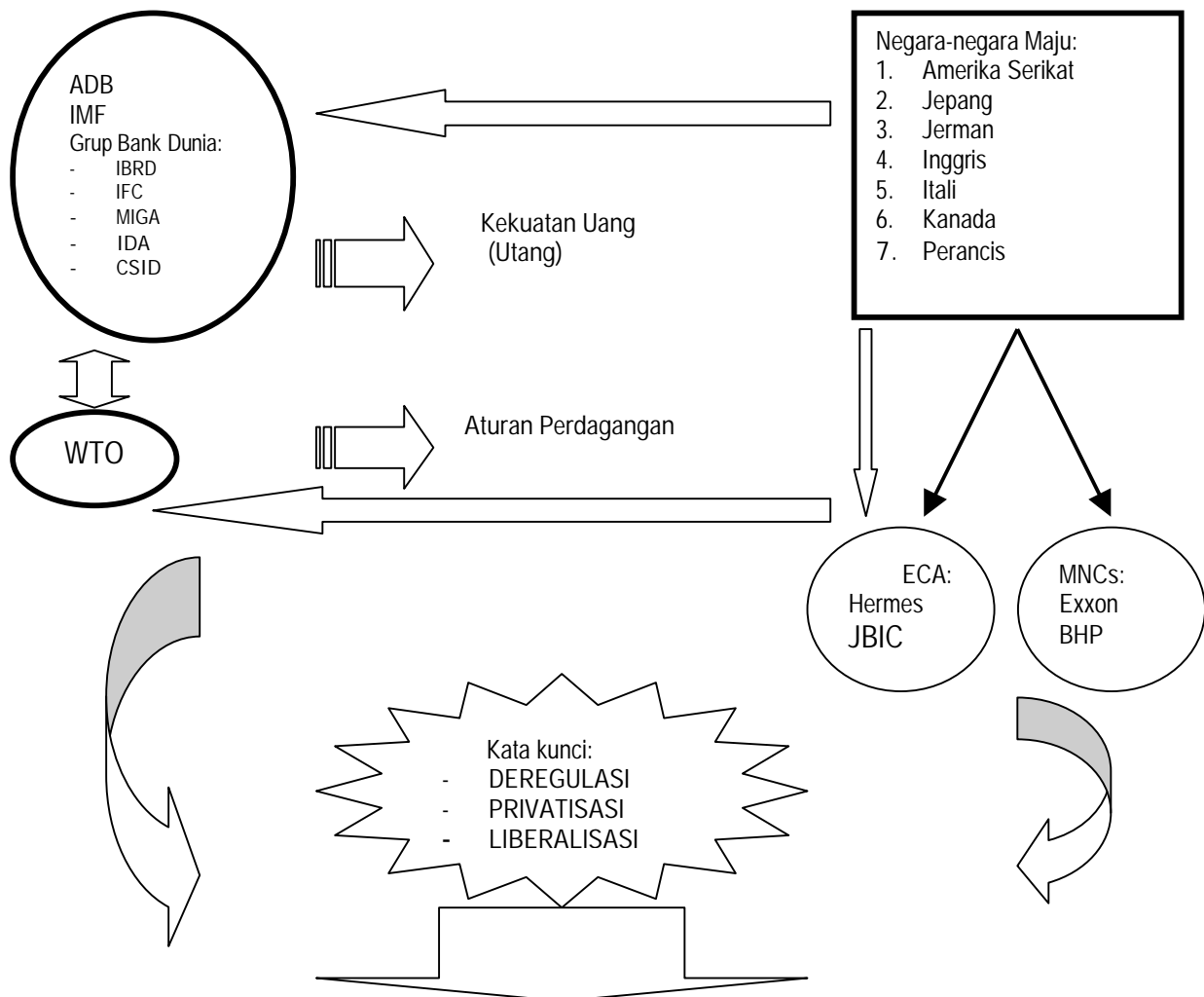
tentang ketenagalistrikan. Warna ketiga UU di atas sangat jelas menuju pada pembongkaran monopoli negara atas sumber daya alam, dengan mengizinkan swasta untuk turut mengelola sumber tersebut.

Pendanaan untuk mendukung skenario di atas dikururkan dari para lembaga keuangan multilateral. Jika uang tidak mencukupi, maka mereka masih memungkinkan untuk meminta kepada ECA. Demikian pula jaminan investasi. Jika penjamin investasi di bawah naungan Bank Dunia (yaitu MIGA) tidak mencukupi, maka dapat ditutupi oleh lembaga asuransi nasional milik negara maju.

Ketika semua jalan telah dimuluskan oleh WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Maka, tiba saatnya para MNC berperan. Mereka dapat bertindak sebagai konsultan (konsultan konstruksi, konsultan keuangan, ataupun konsultatan hukum), ataupun pelaksana proyek. Sehingga tidaklah aneh, jika lobi para MNC ini sangat gencar di arena WTO maupun WB serta ADB. MNC telah berubah wujud menjadi instrumen kontrol tidak langsung dari dominasi yang dilakukan sebelum PD I oleh kekuatan kolonial.

Konspirasi sempurna antara negara-negara maju, lembaga keuangan internasional, WTO dan para konglomerat negara maju (MNC) dapat terlihat dalam bagan I berikut ini.

Bagan I: Skema (Konspirasi) Perampokan Global



NEGARA-NEGARA MISKIN DAN BERKEMBANG

Apa Dampaknya

1. Terjebak dengan skenario neo-liberal

Syarat-syarat adanya deregulasi, privatisasi dan liberalisasi adalah syarat dasar yang ditekankan oleh aliran pendukung neo-liberal, yang sekarang menguasai perekonomian dunia. Setelah tekanan untuk mengadakan aturan-aturan hukum yang mendukung pasar bebas, langkah selanjutnya adalah mendorong swastanisasi. Desakan swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dengan segala dalihnya semakin menguat di Indonesia. Dari 14 BUMN yang akan diswastakan, sangat terlihat bahwa yang mendapat prioritas untuk diswastakan adalah BUMN yang menguntungkan, seperti PLN, Angkasa Pura (pengelola jasa Bandar udara), Telkom, PAM (air minum), BCA dan Bank Niaga (jasa perbankan) dan industri semen (Semen Padang, Semen Gresik dan Semen Tonasa). Yang luput dari proses swastanisasi di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang baku sebagai batasan kerja, apalagi desain strategi swastanisasi yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Maka tidak aneh, jika setiap hari unjuk rasa anti swastanisasi terus berlangsung.

Kebijakan perdagangan dalam WTO juga mendapat kritik tajam, terutama ketika WTO tidak hanya mengurus masalah perdagangan tetapi juga merambah area distribusi asset pengelolaan sumber daya alam dan jasa.

2. Terjebak perangkap utang

Utang luar negeri (ULN) Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sampai September 2000 total ULN mencapai US\$ 149,903 juta (atau Rp. 149 ribu triliun). Jumlah di atas terbagi dalam utang swasta (US\$ 85,608 juta) dan utang publik (US\$ 55,195 juta). Table di bawah menunjukkan tren beban utang luar negeri Indonesia.

Table : Utang Luar Negeri Indonesia (dalam juta US\$)

	Desember 1999	September 2000
Total Utang Luar Negeri	148,097	149,903
A. Sektor Publik	86,409	85,605
1. Pemerintah	75,862	75,407
2. Bank Pemerintah	4,717	4,408
3. BUMN	5,831	5,793
B. Sektor Swasta	61,688	55,195
1. Bank Swasta	6,132	4,986
2. Perusahaan Swasta	55,556	50,209

Sumber: Bank Indonesia

Masalah muncul ketika beban pembayaran cicilan utang luar negeri tersebut memberatkan APBN, karena hampir 1/3 anggaran negara dipakai untuk membayar cicilan utang luar negeri. Bahkan, kini Indonesia telah masuk dalam jebakan utang (debt-trep), karena jumlah utang luar negeri yang didapat lebih kecil dari pada kewajiban membayar cicilan utang. Sebagai gambaran untuk APBN 2001, Indonesia mendapat utang baru sebesar Rp. 35,9 triliun, sementara kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp. 38,8 triliun. Dan yang lebih

menyesakkan adalah utang yang dibuat swasta pun pada akhirnya menjadi beban negara lewat skema penyalangan (bail-out), terutama restrukturisasi perbankan.

Fenomena utang yang "menyesakkan" bangsa ini terus terjadi pada tahun 2002, 2003, 2004, dan bahkan 2005, setelah bantuan untuk Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dari seluruh dunia yang mencapai total sekitar 10 milyar US dollar, yang sebagian besarnya adalah utang. Sekedar info saja bahwa beban utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 2005 ini adalah 7,2 milyar dollar AS. (lihat Kompas, 30/1/05, hal 4).

3. Terjebak perangkap MNC

Konglomerasi para pengusaha makanan asing di Indonesia juga dapat membahayakan pola konsumsi. Mereka memasarkan minuman soft drink, junk food, dan memasarkan minuman beralkohol atau rokok yang tidak layak dikonsumsi. Nestle yang berbasis di Swiss diduga kuat telah merusak pola konsumsi bayi di negara ketiga dengan memaksa minuman susu formula, dan baru-baru ini memakai bahan-bahan transgenic.

Etika para konglomerat global ini juga patut dipertanyakan, karena selalu didasarkan prinsip ekonomi: "Memberi sedikit mungkin, mendapat sebanyak mungkin". Investigasi yang dilakukan kongres Amerika ditahun 1977 menyingkap 360 pengusaha di Amerika yang mengakui telah menyogok negara-negara asing dimana mereka beroperasi. Lebih buruk lagi, kadang mereka membantu rezim setempat untuk urusan politik. Shell –perusahaan minyak Amerika-- mendukung rezim militer, demikian pula Mobil Oil di Aceh yang mengijinkan arealnya dipakai sebagai basis militer.

Beberapa Alternatif Solusi

Gambaran di atas memperlihatkan sebuah persoalan besar, tapi seringkali dianggap tidak besar oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan oleh para elit politik dan elit bisnis (khususnya yang awam terhadap persoalan ini). Padahal, persoalan ini seperti penyakit kanker ganas yang secara pasti akan membunuh siapa pun yang terhinggapinya. Oleh karena "pasiennya" adalah negara secara institusi dan rakyat Indonesia secara substantif yang merasakannya, maka solusinya selain memerlukan political will yang massal, juga waktu yang harus terus berkesinambungan.

Setidaknya, ada 3 (tiga) langkah utama yang dapat dijadikan solusi alternatif:

1. Tahapan Pembangunan Pemahaman dan Kesadaran

Tahapan ini adalah masa yang diperlukan untuk membangun pemahaman atas persoalan ini sekaligus membangun kesadaran dalam pengelolaan negara (Utang/SDA), dengan :

1. Fokus kegiatannya adalah sosialisasi yang bertujuan membangun aspek kognitif dan apektif.
2. Materinya tentang hal-hal yang terkait di atas dan pengembangannya.
3. Instrumennya adalah penataran/ pelatihan.
4. Sasaran utamanya adalah pejabat/pebisnis yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan utang luar negeri (ULN); pengamat dan LSM pendukung ULN; calon-calon dari: pejabat eselon I atau yang akan bersentuhan langsung dengan pengelolaan ULN; pemimpin parpol, ormas, asosiasi-asosiasi terkait; dan lain-lain.
5. Fasilitatornya adalah gabungan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait, perguruan tinggi, pakar, dan LSM terkait.

Tahapan ini sedang berlangsung secara minimal, parsial dan informal, khususnya dilakukan oleh LSM-LSM yang tergabung dalam gerakan Anti Globalisasi (Ekonomi), termasuk yang juga sedang dilakukan oleh penulis.

2. Tahapan Kuratif

Tahapan ini sebenarnya sedang berlangsung dengan scenario "Exit Strategy". Tapi karena political will yang rendah dan kondisi bangsa yang serba dilematis, konsep itu menjadi kurang efektif. Ada beberapa saran terkait dengan kegiatan pada tahapan ini:

- a. Pemerintah harus bersikap seperti Thailand dan India dalam kasus rencana pinjaman utang akibat bencana NAD dan Sumut, yakni menolak.
- b. Bila poin a tidak mungkin, maka harus dibuat "perhitungan prihatin" dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, sehingga besaran pinjaman dapat diminimalisir. Dalam kaitan ini pun, sedapat mungkin agar pemerintah memberdayakan potensi local dan mempertimbangan "keistimewaan local". Pola ini diharapkan juga diterapkan dalam rencana perubahan APBN 2005.
- c. Secara sistematis, pemerintah harus melakukan langkah-langkah diplomatic maupun budgetik dalam menghapus hutang luar negeri, termasuk melakukan debt swap (pengalihan utang ke bentuk lain). Debt swap ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga membangun scenario penyalangan (bail-out) utang dari luar negeri ke utang swasta dalam negeri. Secara substantif langkah ini jauh lebih menguntungkan bangsa Indonesia.

3. Tahapan Preventif

Tahapan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa menghutang adalah budaya yang cenderung menjadi pilihan pada saat bangsa ini mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan keuangan yang ada. Oleh karena itu, tahapan ini dibangun untuk melakukan pencegahan terhadap hutang yang berpotensi menjerat bangsa. Hal ini juga berasumsi bahwa berhutang bukanlah hal yang haram selama tidak merugikan bangsa. Karena itu, bangsa ini mesti :

- a. Mempunyai Undang-Undang Pengelolaan Utang Luar Negeri yang lebih bersolutif jangka panjang dan menguntungkan, baik secara materi maupun immateri.
- b. Membangun badan pengawas ULN (Globalisasi Ekonomi).

Kontribusi Perguruan Tinggi

Dari tiga tahapan alternatif yang dipaparkan di atas, dalam kapasitasnya sebagai sebuah Perguruan Tinggi (PT), maka PT dalam taraf *political will* dapat terlibat pada tiga tahapan tersebut di atas. Namun, dalam kapasitasnya yang riil, maka PT dapat konsentrasi menjadi :

- a. Lembaga yang konsen mengkaji persoalan Globalisasi (Ekonomi): mulai dari konsep, dampak, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan.
- b. Fasilitator (penyelenggara) pelatihan/penataran dalam mensosialisasikan "perang gagasan" terhadap globalisasi (ekonomi), bersama dengan LSM-LSM yang konsen dalam persoalan yang sama.
- c. Karena poin a itulah, PT dapat menjadi pusat informasi Anti Globalisasi (ekonomi) di Indonesia.

Demikian, saya kira untuk sementara ini. Sebagai sebuah gagasan tentu hal ini tak luput dari kekuarangan, karenanya masukan yang konstruktif, sangatlah diharapkan. Dan sebagai sebuah "proposal" yang diajukan dalam forum yang terbatas, maka terbatas pula substansi yang dapat dipaparkan. Karenanya, kesempatan untuk memperdalam dan memperjelas terhadap isi dari "proposal" ini, tentu saja menjadi pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- ® Robert Lekachman & Boris Van Loon, *Capitalism for Beginners*, England, 1981
- ® Kompas, 2 April 2001, "Jepang Restrukturisasi Utang dolar Indonesia"
- ® www.worldbank.org
- ® www.adbusters.org
- ® Arimbi Heroepetri dan Sari Delyani, *Penjara ADB: Panduan Advokasi bagi Masyarakat*, debtWATCH Indonesia, Jakarta, 2000
- ® Patricia Adams, *Odious debt: Loose Lending, Corruption, And the Third World's Environmental Legacy*, Probe Internatioanl, Toronto, 1991.